

**REKAPITULASI
DAFTAR RUU YANG SUDAH DISETUJUI MENJADI UU
PADA MASA KEANGGOTAAN DPR RI PERIODE 2019-2024**

Per 14 Juli 2020

NO.	PROGRAM	DISAHKAN	JUDUL RUU	UU
I.	PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2020. (ditetapkan pada tgl 22 Januari 2020 sebanyak : 50 RUU)	1 (satu) RUU	1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	1. UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
	<p><u>Catatan:</u> Prolegnas Perubahan RUU Prioritas Tahun 2020 pada MP. IV 2019-2020 (ditetapkan pada tgl 16 Juli 2020, jumlahnya menjadi sebanyak 37 RUU, dgn perincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengurangan RUU dari DPR sebanyak 16 RUU, - penambahan 3 RUU dan - Penggantian 2 RUU 	5 (lima) RUU KUMULATIF TERBUKA.	<p>1. RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia – Australia (<i>Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>).</p> <p>2. RUU tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau Dalam Rangka</p>	<p>1. UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia – Australia (<i>Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>).</p> <p>2. UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang RUU tentang RUU tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona</p>

NO.	PROGRAM	DISAHKAN	JUDUL RUU	UU
			<p>Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang</p> <p>3. Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Walikota Menjadi Undang-Undang.</p> <p>4. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Hukum Timbal</p>	<p>Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.</p> <p>3. Dalam proses penomoran.</p> <p>4. Dalam proses penomoran.</p>

NO.	PROGRAM	DISAHKAN	JUDUL RUU	UU
			Balik dalam Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss. 5. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerjasama dalam Bidang Pertahanan	5. Dalam proses penomoran.
II.	PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2021.			
III.	PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2022			
IV.	PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2023.			
V.	PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2024.			
JUMLAH		6 (ENAM) RUU	1 (SATU) RUU 5 (LIMA) RUU KUMULATIF TERBUKA	

JAKARTA, 14 JULI 2020
SET. BADAN LEGISLASI DPR RI